

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori sektor unggulan adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi yang berfokus pada identifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi paling besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Teori sektor unggulan memberikan kerangka kerja yang berguna untuk menganalisis struktur ekonomi suatu wilayah dan memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan dan potensial apabila sektor di wilayah tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain dipasar nasional atau domestik (Rizani, 2019).

Dengan memahami konsep teori ekonomi unggulan dan potensial, pemerintah dan pelaku ekonomi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pertumbuhan neo klasik yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu kemajuan teknologi, penambahan modal atau investasi, dan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga kerja (Batubara, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan pembangunan. Ketika suatu daerah mengalami peningkatan dalam aktivitas ekonomi hal ini akan berkontribusi pada peningkatan output produksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Dengan kata lain, peningkatan kapasitas produksi berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua jenis faktor yang memengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi yang tersedia di daerah tersebut. Sementara itu, faktor non-ekonomi berkaitan dengan kondisi sosial daerah, termasuk kebiasaan, aspek sosial dan politiknya. Indikator kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dari kondisi perekonomiannya. Semakin baik performa ekonomi suatu daerah semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakatnya dan sebaliknya (Zain, 2022).

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan proses perubahan berkelanjutan dalam kondisi perekonomian selama periode tertentu. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah melalui kebijakan desentralisasi yang lebih dikenal sebagai otonomi daerah. Dalam kerangka pembangunan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk membangun serta mengembangkan wilayah masing-masing. Desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan publik sesuai dengan kebutuhan lokal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Monica, 2020).

Pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan dengan besaran pendapatan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut (Rizani, 2019). PDRB berasal dari pendapatan total setiap orang yang berada didalam perekonomian daerah, kenaikan produk dan jasa setiap tahunnya juga bisa disebut sebagai pertumbuhan

ekonomi. Salah satu langkah yang harus diambil untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan meningkatkan potensi dari berbagai sektor yang dapat menstimulasi pembangunan daerah.

PDRB terdiri dari beberapa sektor yang dapat dibagi menjadi dua kategori: sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB suatu daerah dan sering disebut sebagai sektor unggulan dalam perekonomian lokal. Hal ini disebabkan oleh dampak signifikan yang dimiliki sektor ini terhadap ekonomi daerah. Keunggulan kompetitif yang tinggi akan berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor ke wilayah lain juga akan sangat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Semakin tinggi nilai ekspor semakin besar pula kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika nilai ekspor semakin rendah maka pertumbuhan ekonomi juga akan cenderung menurun. Sementara itu, sektor non-basis terdiri dari sektor-sektor lain yang memiliki dampak yang lebih kecil terhadap peningkatan PDRB. Sektor ini sering dianggap kurang potensial tetapi di sisi lain, dapat berfungsi sebagai pendukung bagi sektor unggulan di daerah tersebut (Sjafrijal, 2008).

Dalam merancang strategi pembangunan, pemilihan sektor unggulan menjadi kunci utama. Sektor unggulan ini harus didasarkan pada potensi dan keunggulan komparatif daerah. Dengan fokus pada sektor unggulan, daerah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan memaksimalkan dampak pembangunan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Jaya, 2022) yang menyatakan bahwa sektor unggulan merupakan dasar perencanaan pembangunan yang efektif.

Pembangunan ekonomi adalah proses penting untuk mencapai kemajuan suatu negara (Hutabarat, 2020). Hampir semua negara melaksanakan pembangunan ekonomi dengan tujuan meningkatkan pendapatan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip otonomi dan pengelolaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat serta daya saing daerah. Kebijakan ini memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola pemerintahan di berbagai sektor. Sehingga diharapkan dapat memanfaatkan potensi daerah yang belum tergarap baik potensi alam maupun sumber daya manusia.

Salah satu implikasi penting dari kebijakan ini adalah bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai pembangunan daerah secara mandiri. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan perlu ditetapkan pengembangan wilayah yang berbasis pada potensi unggulan daerah untuk mendanai dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan agar memiliki daya saing, baik di tingkat nasional maupun global. Proses pengembangan ini tidak bisa dilakukan secara serentak di semua sektor ekonomi, melainkan harus diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan. Sehingga dapat mendorong perkembangan sektor-sektor terkait lainnya dan menciptakan keterkaitan antar sektor (Monica, 2020).

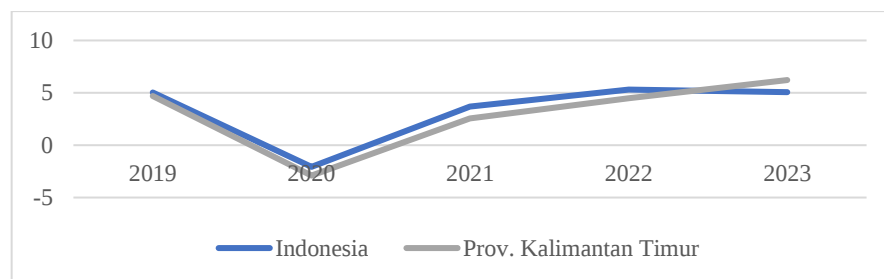
Sebelum penerapan otonomi daerah, ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia disebabkan oleh sistem sentralistik di mana pemerintah pusat

menguasai dan mengendalikan sebagian besar pendapatan daerah yang dianggap sebagai penerimaan negara termasuk pendapatan dari sektor sumber daya alam seperti pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan (Wenda et al., 2023). Akibatnya, daerah yang kaya akan sumber daya alam sering kali tidak mendapatkan manfaat yang sepadan dari hasil tersebut.

Pemerintah daerah dituntut untuk berinovasi dalam mengembangkan ekonomi lokal dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang efisien serta efektif demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran yang matang. Salah satu aspek krusial dalam perencanaan pembangunan adalah kemampuan untuk menjadikan ekonomi daerah sebagai wilayah yang memiliki daya saing tinggi. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga perlu adanya kebijakan utama yang menekankan pada upaya maksimal dalam memprioritaskan pembangunan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada di masing-masing daerah (Jaya, 2022).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di negara Indonesia yang memiliki sumber potensi yang melimpah. Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km². Penggerak utama perekonomian Kalimantan Timur adalah sektor pertambangan dan penggalan, yang menyumbang 41,43% dari Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil tambang dari Provinsi Kalimantan Timur mayoritas diekspor keluar negeri, sehingga membuat provinsi ini menjadi penghasil devisa utama bagi Indonesia.

Jika melihat data dari badan pusat statistik, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena adanya pembangunan Ibu Kota baru. Pada tahun 2020 sempat mengalami fluktuasi karena adanya pandemi covid. Namun di tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,22 persen lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,48 persen. Salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi di Provinsi ini berkembang pesat adalah karna adanya Ibu Kota Nusantara (IKN).



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (data telah diolah, oleh peneliti)

Gambar 1.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2019-2023

Laju PDRB Provinsi Kalimantan Timur sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2020 karna adanya pandemi covid-19. Namun, di tahun 2021 dan 2022 laju PDRB di Kalimantan Timur mulai meningkat sebesar 2,55 dan 4,48 persen, selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada tahun 2023 meningkat pesat sebesar 6,22 persen lebih besar dari laju PDB Nasional. Hal itu terjadi karena adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Provinsi tersebut. Rata-rata PDRB Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,01 persen di bawah pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 3,40 persen.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 3 Kota dan 7 Kabupaten. Tiga Kota diantaranya adalah Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Serta Tujuh Kabupaten yaitu Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, Mahakam Ulu dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dari 10 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, Penajam Paser Utara dipilih sebagai Ibu Kota baru. Alasan pemerintah memilih Kabupaten tersebut sebagai ibu kota baru karena rendahnya resiko bencana alam, tersedianya lahan seluas 180 ribu hektar yang siap dibangun, serta lokasinya yang strategis dan dekat dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi seperti Kota Balikpapan dan Samarinda. Lalu, minimnya konflik sosial di wilayah tersebut menjadi pertimbangan penting. Dengan berpindahnya ibu kota, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan transformasi struktural yang lebih komprehensif meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, jika melihat data pada tabel 1.1 Laju PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki laju PDRB terendah kedua setelah Kabupaten Bontang dan meningkat pesat setelah dijadikan sebagai ibu kota.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
2019-2023 (Persen)

Wilayah Kalimantan Timur	2019	2020	2021	2022	2023
Paser	3.99	-2.86	5.39	1.1	1.38
Kutai Barat	5.69	-2.87	4.19	4.78	5.82
Kutai Kartanegara	3.92	-4.21	2.68	3.7	5.13
Kutai Timur	8.17	-3.08	-0.89	5.58	7.71

Wilayah Kalimantan Timur	2019	2020	2021	2022	2023
Berau	5.63	-3.32	5.36	3.95	5.44
Penajam Paser Utara	2.61	-2.34	-1.69	14.49	29.85
Mahakam Ulu	5.52	-0.22	1.27	0.91	2.8
Balikpapan	4.99	-0.91	4.57	4.96	6.49
Samarinda	5	-0.99	2.78	6.6	8.62
Bontang	-2.15	-2.74	1.60	2.46	4.16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan salah satu dari wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki empat. Kabupaten Penajam merupakan wilayah pertumbuhan baru di Kalimantan Timur yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2023. Tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi di Penajam Paser utara berada pada posisi 2 terbawah setelah Kota Bontang sebesar 2,61 persen. Pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Penajam mengalami penurunan yang cukup drastis karna adanya pandemi covid-19. Adanya pembatasan aktivitas pada masa itu berdampak pada penurunan produksi di berbagai sektor, terutama pada sektor pariwisata, transportasi dan perdagangan. Selain dari adanya pandemi covid-19, penurunan laju PDRB juga disebabkan oleh penyesuaian proyek di IKN yang pada tahap awal pembangunannya di fokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan utilitas. Sektor-sektor lain seperti perdagangan dan jasa, belum mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga di tahun 2022 dan 2023 laju pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan yang signifikan berada di angka 14,49 persen dan 29,85 pesen. Hal itu didorong oleh proyek ibu kota nusantara (IKN) yang menjadikan dinamika pertumbuhan ekonomi berkembang pesat

Dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami kenaikan hal ini dapat di katakan menjadi suatu hal yang positif bagi Kabupaten Penajam. Jika diamati, ada beberapa sektor yang mendominasi pada lima tahun terakhir ini serta besarnya berbeda-beda seperti pada tahun 2019 di dominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan angka sebesar 2.155.823,76 juta rupiah, sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 1.376.334,48 juta rupiah dan sektor industri pengolahan sebesar 1.042.941,91 juta rupiah. Tiga Sektor ini hanya mendominasi di tahun 2019 sampai 2022. Meskipun pada tahun 2020 di Indonesia terjadi pandemi, yang mana tidak begitu berdampak bagi PDRB Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya sektor yang terus menerus mengalami peningkatan yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Namun, pada tahun 2023 posisi sektor pertambangan dan penggalian mengalami pergeseran oleh sektor konstruksi. Sektor konstruksi mengalami peningkatan yang sangat pesat dan menggantikan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor konstruksi di kabupaten penajam menjadi sektor yang mendominasi dari sektor-sektor lain dengan angka sebesar 3.531,132 juta rupiah. Hal ini dapat di lihat dari tabel di bawah yang menunjukkan ada 17 sektor menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara selama 2019-2023

Tabel 1.2

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Penajam Paser Utara
Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (juta rupiah)**

Sektor Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.376.334,48	1.347.654,53	1.342.846,55	1.341.375,66	1.352.977,21
B. Pertambangan dan Penggalian	2.155.823,76	2.042.635,97	1.739.405,59	1.796.598,79	2.046.817,26

Sektor Ekonomi	2019	2020	2021	2022	2023
C. Industri Pengolahan	1.042.941,91	969.829,54	945.445,94	947.862,39	949.461,95
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.405,51	6.136,10	6.575,48	6.870,30	7.967,18
E. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	6.166,84	6.316,84	6.787,19	7.286,31	8.184,59
F. Konstruksi	651.985,09	698.244,23	884.056,64	1.678.104,94	3.531.132,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	603.910,47	613.059,29	635.465,40	672.453,12	714.357,94
H. Transportasi dan Pergudangan	111.762,09	110.296,55	113.320,37	122.112,47	133.936,63
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.488,57	29.140,67	29.888,35	32.286,08	35.238,45
J. Informasi & komunikasi	105.961,34	116.652,54	125.657,38	133.357,38	139.313,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	48.816,53	51.574,00	52.429,51	55.465,40	62.825,30
L. Real Estate	90.053,68	92.006,73	91.149,59	92.534,01	94.360,43
M.N. Jasa Perusahaan	1.139,03	1.100,60	1.115,12	1.166,72	1.243,24
O. Administrasi Pemerintahan. Pertahanan. dan Jaminan Sosial Wajib	249.026,24	233.424,78	225.110,76	241.127,11	257.407,27
P. Jasa Pendidikan	222.794,20	227.849,37	234.585,59	242.284,32	251.157,12
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.805,49	2.153,12	2.552,63	2.662,36	2.839,36
R.S.T.U Jasa Lainnya	58.164,64	56.146,09	56.283,66	60.020,53	63.429,43
PDRB	6.762.579,87	6.604.220,95	6.492.675,75	7.433.567,89	9.652.648,86

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara

Jika melihat tabel 1.2 dapat di artikan bahwasanya sektor yang menjadi suatu potensi pada suatu wilayah dapat berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Hal ini menunjukan apakah sektor kontruksi akan terus menjadi sektor yang mendominasi dalam jangka panjang atau di masa depan sektor tersebut mengalami reposisi menjadi sektor pendukung sektor unggulan dan ada sektor lain yang lebih tepat untuk dijadikan fokus pemerintah dalam stategi kebijakan pembangunan ekonomi dan menciptakan daya saing di Kabupaten Penajam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki laju pertumbuhan ekonomi terendah kedua pada tahun 2019 dan

2020. Namun, setelah adanya pembangunan dan dijadikan sebagai ibu kota nusantara, laju pertumbuhannya meningkat pesat dan berada di posisi pertama jika dibandingkan dengan Kota atau Kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam menjadi kabupaten dengan penyumbang PDRB terbesar yang tentunya memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Namun di satu sisi masih terdapat beberapa sektor yang dari segi kontribusinya dinilai masih minim dan relatif rendah. Diharapkan dengan adanya pengelompokan dan pencatatan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara akan membantu pemerintah dalam mengatur skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menentukan sektor unggulan dan sektor potensial, pergeseran sektor perekonomian, dan pengklasifikasian pertumbuhan pada sektor ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan empat metode penelitian yaitu metode *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), *shift-share* dan tipologi klassen agar proses perencanaan pembangunan sektor ekonomi unggulan dan potensial dapat tercipta, karena sektor yang menjadi unggulan tersebut dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Dengan demikian strategi perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan potensi sektoralnya tanpa mengesampingkan pembangunan sektor lain yang ada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini guna mempersiapkan pengembangan pembangunan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Potensial di Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahun 2019-2023**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan dan sektor potensial di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023?
3. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023.
2. Mengetahui pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023.
3. Mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak manapun:

1. Manfaat Teoritis:

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Penajam Paser Utara dan penelitian ini juga menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan di Universitas Siliwangi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi Ibu Kota Nusaantara.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur melalui data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Penajam Paser Utara.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil sejak diterbitkan surat keputusan tentang skripsi/tugas akhir tahun ajaran 2024/2025. Jadwal pelaksanaan penelitian ini digambarkan dengan menggunakan matriks sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jadwal Pelaksanaan Penelitian

[illegible]